



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/20/KEP/413.013/2019**

TENTANG

**PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan keuangan daerah pada Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019, serta guna melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menunjuk Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 3/D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

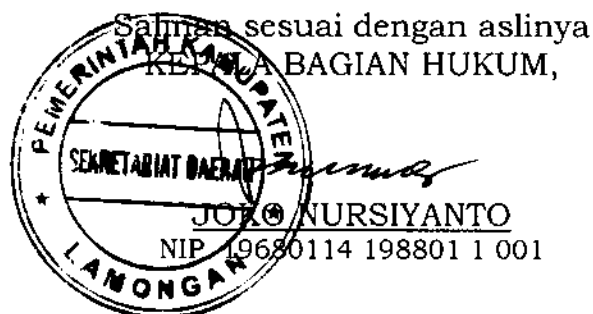
- KESATU : Menunjuk Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 dengan nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini, dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Sekretaris/Kepala Badan/Dinas/
Bagian di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Camat se Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Bendahara Penerimaan dan
Bendahara Pengeluaran dimaksud.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR :188/20/KEP/413.013/2019
TANGGAL : 2 JANUARI 2019

NAMA-NAMA BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Perangkat Daerah	Bendahara Penerimaan	Bendahara Pengeluaran
1	2	3	4
1.	Sekretariat Daerah	-	Ning Azizah 19630827 200701 2 002
2.	Sekretariat DPRD	-	Gianto 19860613 201212 1 001
3.	PPKD	Fajar Cahyono, Amd. 19770328 201001 1 002	Elma Karunia Agustya, S.E. 19830828 201001 2 017
4.	Inspektorat	-	Edi Suwoto 19820514 200901 1 005
5.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rokanah, S.E. 19660223 199003 2 010	Marsiti, S.H. 19750716 200801 2 0160
6.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	Sri Kuncoro 19690902 201001 1 004
7.	Badan Kepegawaian Daerah	-	Siti Tita Kumala A.S, Amd. 19870922 201101 2 027
8.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	Dwi Setyono 19770531 199901 1 002
9.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	Audi Rachman, S.T. 19820314 201101 1 006
10.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	M. Khusnul Khuluk 19760120 200701 1 008
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	Tambit 19720213 200801 007
12.	Dinas Lingkungan Hidup	-	Andi Asmara 19781026 200901 1 005
13.	Dinas Kearsipan Daerah	-	Ali 19630505 199003 1 012
14.	Dinas Perpustakaan Daerah	-	Hatta, S.E. 19750806 200701 1 015

1	2	3	4
15.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ernik Denytalia, S.E. 19850426 201101 2 016	Yatim Setyo Widodo, S.E. 19801007 201504 1 002
16.	Satuan Polisi Pamong Praja	Lugut Veriyanto 19831108 201001 1 002	Pambudy Basuki 19820506 201001 1 001
17.	RSUD Dr. Soegiri	Suwarno 19620223 198708 1 001	Reza Greta Windinata, S.E. 19890618 201101 1 003
18.	RSUD Ngimbang	Sujadi, S.Sos. 19701219 200801 1 010	Widii Wahyu Riyanto, A.Md. 19850607 201001 1 016
19.	Dinas Pendidikan	-	Matraji, S.H. 19620212 198904 1 001
20.	Dinas Pemuda dan Olahraga	Supriyadi 19710602 201212 1 002	Samsul Hadi 19731020 200901 1 003
21.	Dinas Perhubungan	Jono 19660212 199208 1 001	Juli Angreni, S.E. 19700727 200801 2 020
22.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Ari Vitriyah S, S.E. 19780830 200902 2 002	Muhammad Khorim, S.H. 19730105 200801 1 009
23.	Dinas Kesehatan	-	Wiwik Handayani, Amd.Keb. 19730614 199302 2 003
24.	Dinas Sosial	-	Nanik Herawati, S.Psi., M.M. 19820619 201101 2 015
25.	Dinas Tenaga Kerja	Khanif 19640418 198502 1 002	Syamsuri, S.Sos. 19750210 200701 1 006
26.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	Kasiono 19640317 199312 1 002
27.	Dinas PU Bina Marga	Sudiyanto 19621026 200604 1 003	Lukman, S..E. 19640204 200701 1 015
28.	Dinas PU Sumber Daya Air	A.Bahcrul Ma'sum 19690805 200701 1 029	Mochmamad Fazarie, S.E. 19681128 200701 1 010
29.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	-	Kharismawan Wibowo H, S.E. 19790830 201101 1 002
30.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dedi Adi Saputra 19811221 200801 1 003	Sri Yuli Suntari, Amd. 19730717 201212 2 003
31.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Sepiyana Dwi Sugihartatik 19770901 201212 2 001	Nurwaqi'ah 19740127 201212 2 001

1	2	3	4
32.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Lailatul Fitriyah, S.T. 19880415 201504 2 002	Gufron Sholikin, S.E. 19850603 201101 1 014
33.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nur Mufidah, A.Md, S.Pt. 19831003 200902 2 002	Imam Tohari 19670918 199103 1 007
34.	Dinas Perikanan	Pardi, S.Pi. 19680604 199403 1 010	Muchlisin, S.Pi. 19751012 200801 1 011
35.	Badan Pendapatan Daerah	Sutrisno 19630810 198412 1 007	Johan Haryanto, Amd. 19820915 201406 1 002
37.	Dinas Ketahanan Pangan	Tri Wahyudi Agus M, S.TP 19840808 201101 1 011	Indah Wahyuni, S.E. 19760519 200701 2 009
38.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	Siti Yahwaroh, S.Si. 19870516 201101 2 012
39.	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	Khuzainan, Amd. 19770703 201001 1 006
40.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	Slamet Pramono 19770530 200801 1 012
41.	Kecamatan Solokuro	-	Moh. Husaini, S.Sos. 19740214 200701 1 021
42.	Kecamatan Pucuk	-	Sumantri 19710529 200701 1 019
43.	Kecamatan Sukorame	-	Pasiyat 19710407 2003 12 1 008
44.	Kecamatan Lamongan	-	Nur Chasanah, S.E. 19760327 199602 2 001
45.	Kecamatan Deket	-	Sri Kiswatin 19630602 198602 2 001
45.	Kecamatan Kalitengah	-	Didik Suharto, S.IP. 19761206 2000112 1 012
46.	Kecamatan Karangbinangun	-	Subiyantoro 19620722 198503 1 010
47.	Kecamatan Paciran	-	Puguh Santoso, S.E. 19820720 201001 1 001
48.	Kecamatan Brondong	-	Budi Riyanto 19690703 200112 1 003
49.	Kecamatan Tikung	-	Indah Dwi Utami 19811020 201408 2 003

1	2	3	4
50.	Kecamatan Bluluk	-	Darmojo 19690806 200701 1 035
51.	Kecamatan Modo	-	Edi Susanto 19700729 200801 1 010
52.	Kecamatan Karanggeneng	-	Ria Hidayati, Amd. 19900917 201504 2 001
53.	Kecamatan Maduran	-	Suhud 19641215 200901 1 001
54.	Kecamatan Glagah	-	Suwono 19660922 200701 1 010
55.	Kecamatan Sukodadi	-	Kasbolah 19820509 201001 2 014
56.	Kecamatan Ngimbang	-	War 19660209 200701 1 016
57.	Kecamatan Kembangbahu	-	Wiwik Setyawati 19800418 200501 2 012
58.	Kecamatan Sambeng	-	Tri Agung 19780128 201001 1 009
59.	Kecamatan Turi	-	Iham Mujiono 19720205 200801 1 014
60.	Kecamatan Sarirejo	-	Listiyawati, Amd. 19871010 201504 2 001
61.	Kecamatan Sekaran	-	Yhudi Pujiyanto 19770125 201001 1 002
62.	Kecamatan Babat	-	Suhariyanto 19830902 201001 1 004
63.	Kecamatan Kedungpring	-	Saip 19650929 200701 1 002
64.	Kecamatan Laren	-	Karsam 19630313 200701 1 014
65.	Kecamatan Sugio	-	Siti Azizah 19691028 199303 2 007
66.	Kecamatan Mantup	-	Sri Endiah Purnawati 19750924 199403 2 002

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

